BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa salah satu perbedaan mendasar antara otonomi daerah dengan pemerintahan terpusat adalah adanya kewenangan penuh yang dimiliki daerah untuk mengelola keuangannya sendiri. Kondisi ini didasari asumsi bahwa pemerintah daerah adalah institusi yang paling memahami kondisi daerahnya sendiri. Pemerintah daerah tentunya mengetahui bagaimana kondisi keuangan daerahnya karena mereka yang bergerak langsung dalam upaya pengelolaan keuangan yang lebih baik. Kinerja keuangan daerah tentu menjadi bagian penting bagi pemerintah daerah dan juga pihak eksternal. Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pengelolaan keuangan secara baik dan tepat untuk mempertahankan layanan yang diharapkan pemerintah (Tahir, 2018).

Kinerja keuangan tidak terlepas dari pengelolaan anggaran pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik. Anggaran pemerintah daerah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang juga merupakan instrumen fiskal pemerintah daerah dalam mengendalikan perekonomian di wilayahnya. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, terdapat enam fungsi APBD yang wajib diterapkan dalam setiap penyusunan APBD, diantaranya: fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi (Riadi, 2015). Pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun daerah serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya diharapkan dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih tepat sesuai data potensi suatu wilayah dari sisi pendapatan dan pengeluarannya.

Potensi dari sisi pendapatan dapat dimanfaatkan sebagai tolok ukur suatu pemerintahan dalam menentukan kebijakan berdasarkan besaran pendapatan yang diperoleh dalam suatu daerah, sedangkan dari sisi pengeluaran dapat dilihat potensi pengeluaran pemerintah yang mungkin membantu dalam melihat alur pendapatan daerah akan dibelanjakan. Data APBD maupun realisasi APBD tentunya harus memberikan manfaat dalam melakukan evaluasi kebijakan pemerintah daerah. Berbagai rasio keuangan dapat dihitung berdasarkan data APBD dan realisasinya yang kemudian akan sajikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak untuk menilai kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya (Horota, 2017).

Salah satu provinsi di Indonesia yang terus berupaya dalam menerapkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk dapat menciptakan kinerja keuangan yang memadai adalah Provinsi Bali. Rencana pembangunan di Bali tidak hanya dilakukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi saja, melainkan juga harus mampu menciptakan pemerataan pendapatan masyarakatnya. Upaya pembangunan

yang bertujuan untuk lebih menyejahterakan masyarakat perlu untuk dilakukan agar dapat memperkuat pondasi pembangunan Provinsi Bali dalam segala aspek kehidupan. Harapan pemerintah tentunya agar mampu meningkatkan taraf hidup dan menciptakan pendapatan masyarakat yang lebih merata, sehingga tercipta tingkat kemakmuran masyarakat yang lebih baik. Tingkat kemakmuran masyarakat dapat diukur dari pendapatan per kapita. Semakin besar pendapatan per kapita maka dapat dikatakan semakin sejahtera/makmur suatu daerah/wilayah.

Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi tolak ukur kinerja keuangan daerah. Otonomi daerah dapat memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya serta menggali potensi yang dimiliki daerah demi tercapainya pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kinerja keuangan daerah dan pelayanan publik. Tercapainya pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat juga berasal dari tata cara pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien tentunya akan berdampak pada kinerja daerah yang diukur melalui pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Jayanti dan Priyo, 2018).

Angka agregat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun tentunya menjadi angka dalam pertimbangan kinerja keuangan Provinsi Bali. Indikator yang sering digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi yang merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah yang berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang baik menjadi indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi (Horota, 2017). Pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat tentunya dengan adanya pengelolaan keuangan yang

memadai sehingga menciptakan kinerja yang efektif. Secara logika dapat dikatakan bahwa semakin baik kinerja keuangan yang dicapai oleh pemerintah daerah tentunya akan ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin baik. Melalui pengelolaan keuangan yang baik tentunya aspek pendapatan daerah akan dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan perekonomian masyarakat, sehingga ekonomi akan terus berkembang tentunya ke arah yang lebih baik. Total perekonomian Provinsi Bali tahun 2019 disajikan pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Total Perekonomian Bali Tahun 2019

No	Indikator	Nilai (dalam triliun rupiah)
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku	252,60
2	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan	162, <mark>7</mark> 8

Sumber: BPS Provinsi Bali (2020)

Proyeksi jumlah penduduk Bali pada tahun 2019 sebesar 4,34 juta jiwa, PDRB perkapita atas dasar harga berlaku mencapai 58,24 juta rupiah. Proyeksi maksimal jumlah penduduk Bali sebesar 4,38 juta jiwa. Ekonomi Bali tahun 2019 tercatat tumbuh 5,63 persen, melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2018 yang mencatatkan angka 6,33 persen. Struktur ekonomi Bali dari sisi lapangan usaha pada tahun 2019 masih didominasi oleh Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dengan kontribusi sebesar 23,26 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yaitu sebesar 47,96 persen (BPS Provinsi Bali, 2020). Data laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 disajikan pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2015-2019

	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/ Kota				
Kabupaten/Kota _	(%)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Jembrana	6,19	5,96	5,28	5,59	5,56
Kab. Tabanan	6,19	6,14	5,37	5,73	5,60
Kab. Badung	6,24	6,81	6,08	6,74	5,83
Kab. Gianyar	6,30	6,31	5,46	6,03	5,64
Kab. Klungkung	6,11	6,28	5,32	5,50	5,44
Kab. Bangli	6,16	6,24	5,31	5,50	5,47
Kab. Karangasem	6,00	5,92	5,06	5,48	5,50
Kab. Buleleng	6,07	6,02	5,38	5,62	5,55
Kota Denpasar	6,14	6,51	6,05	6,43	5,84
Provinsi Bali	6,03	6,33	5,56	6,33	5,63

Sumber: BPS Provinsi Bali (2020)

Data pada tabel 1.2 memperlihatkan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Bali mengalami fluktuasi yang dimana kadang terjadi peningkatan dan kemudian kembali menurun di tahun berikutnya. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali tahun 2015 sebesar 6,03%, meningkat di tahun 2016 menjadi 6,33%. Di tahun 2017 kembali menurun cukup signifikan menjadi sebesar 5,56%. Tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup tinggi menjadi sebesar 6,33% atau setara dengan tahun 2016. Menurun drastis kembali di tahun 2019 yang hanya sebesar 5,63%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali masih perlu banyak dievaluasi karena sejauh ini sesuai data yang ada, pertumbuhan ekonomi masih berfluktuasi yang terkadang mengalami penurunan yang dimana hal ini dapat menjadi salah satu tolak

ukur kurang optimalnya pengelolaan keuangan yang menciptakan kinerja keuangan yang kurang memuaskan.

Upaya pembangunan daerah untuk mencapai pemenuhan kesejahteraan masyarakat daerah membutuhkan adanya peningkatan dan perbaikan dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Setiap daerah diharapkan dapat mengelola keuangan daerah sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Tahir (2018) menyatakan bahwa pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah selain dapat dilihat dari aspek kinerja non-keuangan juga dapat dilihat melalui aspek keuangan. Menurut Mahsun (2013), pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tuju<mark>an</mark> dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk didalamnya informasi atas efisiensi pengguna<mark>an</mark> sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas <mark>b</mark>arang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai suatu tujuan. Gambaran kinerja keuangan dapat diketahui dengan melakukan analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Analisis laporan keuangan me<mark>rupakan kegiatan untuk menginterpre</mark>tasikan angka-angka pada laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang dimana akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik (Mahmudi, 2016:89).

Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, diantaranya: opini audit, belanja modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dana perimbangan. Kusuma (2017) menyatakan bahwa opini audit BPK merupakan wujud akuntabilitas pemerintah daerah yang dapat dinilai oleh publik yang dimana semakin baik opini audit maka dapat menunjukkan

semakin membaiknya kinerja suatu pemerintah daerah. Muflihatin (2016) menyatakan bahwa untuk dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah maka harus diawali dengan peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan yang ditandai dengan tercapainya opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Semakin baik opini audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tentunya akan dapat meningkatkan legitimasi masyarakat terhadap Pemerintah Daerah, karena masyarakat akan lebih percaya atas kredibilitas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yang mana atas kepercayaan yang semakin meningkat tersebut maka mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui pembayaran PAD, khususnya pajak dan retribusi daerah.

Lebih lanjut opini audit melalui pemeriksaan BPK dimaksudkan agar transparansi dan akuntabilitas keuangan negara dapat terwujud dan untuk mengetahui upaya instansi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hasthoro dan Sunardi (2016) menyatakan bahwa di dalam era reformasi sektor publik, pemerintah juga diharapkan bisa melaporkan hasil dari program yang telah dijalankan untuk dapat dinilai apakah pemerintah bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien. Hartati (2011) mengemukakan bahwa kriteria pemeriksaan atas atas laporan keuangan yang dilakukan dalam rangka memberikan pendapat atau opini atas kewajaran informasi keuangan, yang disajikan dalam laporan keuangan salah satunya berdasarkan pada pengungkapan yang lengkap.

Provinsi Bali kembali mencatat prestasi gemilang di mana untuk ketujuh kalinya secara terus-menerus mendapatkan opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas audit Laporan Keungan Pemerintah Daerah

(LKPD) dari tahun anggaran 2013 -2019. Bagi Provinsi Bali, ini untuk ketujuh kalinya secara beruntun memperoleh opini tertinggi WTP dari BPK. Sebelumnya, WTP dari BPK RI diperoleh Pemprov Bali atas audit LKPD Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018. Sebelum berhasil meraih WTP, Bali sempat tiga kali beruntun terpaku dengan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI, yakni atas audit LKPD Tahun Anggaran 2010, 2011, dan 2012 (nusabali, 2020). Semakin baik opini audit tentunya pengelolaan keuangan pemerintah dapat dikatakan baik karena hasil pemeriksaan telah mencakup mengenai kinerja keuangan.

Pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelola keuangannya sendiri secara mandiri. Pemerintah menggunakan instrumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam mengelola keuangannya. APBD merupakan rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah yang dijadikan sebagai instrumen utama pemerintah daerah dalam menyusun dan menentukan kebijakan daerah. APBD memuat anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan daerah (Riadi, 2015). APBD merupakan instrumen kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat (Suryaningsih, et. al., 2015).

Belanja modal menjadi salah satu komponen dari APBD. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengeluaran atau

pembayaran aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk kegiatan pemerintahan dan memberikan manfaat untuk masyarakat, dimana dengan alokasi belanja modal dalam penelitian ini memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah. Asnidar (2019) menyatakan bahwa belanja modal yang besar menjadi cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun yang memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan maka akan semakin meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga merupakan salah satu komponen dari APBD, dimana PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Tahir, 2018). Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, dimana PAD diperoleh dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainlain PAD yang sah. PAD yang semakin meningkat diharapkan dapat memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang memadai kepada masyarakat. Pemerintah daerah yang mampu mencapai jumlah pendapatan daerah yang tinggi tentunya mempunyai ketersediaan jumlah kas yang cukup untuk melakukan pembiayaan kegiatan program kerja yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan, sehingga akan tercipta kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang baik. Semakin tinggi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat atau

baik dalam membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut (Tahir, 2018).

Dana perimbangan juga diindikasikan dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daera. Dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai pembangunan, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah. Andirfa (2016) menyatakan bahwa dana perimbangan secara ratarata di daerah lain di Indonesia terhitung sebesar 80% dari penerimaan daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah akan menciptakan defisit. Semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah tergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya, sehingga akan membuat kinerja keuangan daerah menurun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Prinsip dana alokasi umum adalah bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhannya kecil akan memperoleh dana alokasi umum yang relatif kecil. Sebaliknya jika suatu daerah potensi fiskalnya kecil sedangkan kebutuhannya besar maka daerah tersebut akan menerima alokasi dana alokasi umum yang relatif besar (Pratiwi, 2018).

Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat berpengaruh terhadap tercapainya kinerja keuangan pemerintah daerah yang memadai untuk kepentingan publik. Dana Alokasi Khusus (DAK) dikatakan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan. Semakin besar DAK yang diberikan kepada pemerintah daerah tentunya akan membantu pemerintah daerah dalam membiayai urusan daerah, sehingga kinerja keuangan akan semakin baik pula karena dana yang dikelola oleh pemerintah daerah semakin banyak.

Siagian (2018) menyatakan bahwa DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggungjawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah (Siagian, 2018).

Hasil-hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya. Penelitian mengenai opini audit dalam pengaruhnya dengan kinerja keuangan pernah dilakukan oleh Masdiantini (2016) yang memperoleh hasil bahwa opini audit berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan pemerintah. Hasil yang sejalan juga diperoleh oleh Budianto (2015) yang menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil penelitian Muflihatin (2016) menunjukkan hasil berbeda bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Hasil penelitian oleh Kusuma (2017) juga menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah

kabupaten/kota.

Penelitian mengenai belanja modal pernah dilakukan oleh Anggreni dan Artini (2019) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif serta signifikan pada kinerja keuangan. Sementara itu, penelitian oleh Pratiwi (2018) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara belanja modal dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian oleh Asnidar (2019) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di Kota Langsa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggreni dan Artini (2019) menyatakan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil sejalan juga diperoleh oleh Pratiwi (2018) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang dilakukan Putra (2015) memperoleh hasil bahwa PAD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Penelitian mengenai Dana Alokasi Umum (DAU) pernah dilakukan oleh Azizah (2019) yang memperoleh hasil bahwa DAU berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil yang sama juga diperoleh oleh Gracenov (2016) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian oleh Radjak (2018) memperoleh hasil bahwa DAU tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian Putra (2015) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja keuangan. Penelitian oleh Azizah (2019) juga memperoleh hasil sejalan yang menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Terdapat beberapa hal yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah pada penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal sebagai variabel yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah. Selain itu, juga ditambahkan mengenai variabel opini audit. Mengenai variabel opini audit ditambahkan pada penelitian ini karena seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah tujuh kali memperoleh opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sudah wajar tanpa adanya kecurangan yang material. Akan tetapi, di sisi lain mengenai pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan yang sangat signifikan.

Berdasarkan pada beberapa permasalahan yang masih terjadi pada pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali dan ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk kembali meneliti mengenai pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dengan mengajukan judul penelitian "Pengaruh Opini Audit, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2015-2019".

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.2.1 Terdapat ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian sebelumnya yakni Masdiantini (2016) dan Budianto (2015) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan, sedangkan hasil

penelitian Muflihatin (2016) dan Kusuma (2017) menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Pada variabel modal kerja, Artini (2019) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh negatif pada kinerja keuangan, sedangkan Pratiwi (2018) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara belanja modal dengan kinerja keuangan.

- 1.2.2 Pada variabel PAD, Anggreni dan Artini (2019) dan Pratiwi (2018) menyatakan bahwa PAD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan Putra (2015) menemukan bahwa PAD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Pada variabel DAU, Azizah (2019) dan Gracenov (2016) memperoleh hasil bahwa DAU berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan penelitian oleh Radjak (2018) menyatakan bahwa DAU tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kineraj keuangan.
- 1.2.3 Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa mengalami fluktuasi setiap tahunnya yang dimana terkadang meningkat dan juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali tahun 2015 sebesar 6,03%, meningkat di tahun 2016 menjadi 6,33%. Di tahun 2017 kembali menurun cukup signifikan menjadi sebesar 5,56%. Tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup tinggi menjadi sebesar 6,33% atau setara dengan tahun 2016. Akan tetapi kembali menurun drastis di tahun 2019 yang hanya sebesar 5,63%.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dalam penelitian ini difokuskan dan dibatasi pada permasalahan mengenai bagaimana menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan kajian opini audit, belanja modal, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Dana perimbangan dibagi menjadi tiga, yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil. Akan tetapi, pada penelitian ini hanya digunakan dua yakni dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Pembatasan pembahasan penelitian ini dilakukan untuk efisiensi waktu dan agar permasalahan yang dikaji dapat terfokus, sehingga akan memberikan hasil yang maksimal. Penelitian ini akan melakukan analisis pada laporan realisasi anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2015 sampai 2019.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, adapun permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1.4.1 Bagaimana pengaruh opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2015-2019?
- 1.4.2 Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2015-2019?
- 1.4.3 Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2015-2019?
- 1.4.4 Bagaimana pengaruh dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2015-2019?

1.4.5 Bagaimana pengaruh dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2015-2019?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1.5.1 Untuk menganalisis pengaruh opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2015-2019.
- 1.5.2 Untuk menganalisis pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2015-2019.
- 1.5.3 Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2015-2019.
- 1.5.4 Untuk menganalisis pengaruh dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2015-2019.
- 1.5.5 Untuk menganalisis pengaruh dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2015-2019.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan referensi selanjutnya khususnya bagi yang ingin memperdalam pengetahuan mengenai akuntansi pemerintah daerah khusunya mengenai bagaimana menilai kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan hasil

perhitungan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini selain sebagai syarat untuk menyelesaikan studi, juga sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu dan teori yang didapat di bangku perkuliahan dalam kasus nyata di lapangan. Penelitian ini juga dapat menambah wawasan peneliti khususnya mengenai cara menganalisis laporan keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2. Bagi Instansi (Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali)

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah selama beberapa tahun sehingga dapat terpacu untuk terus meningkatkan kinerja keuangan dan kualitas pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan kepada masyarakat guna mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga masyarakat dapat turut aktif berpartisipasi dengan memberikan pendapat dan masukan kepada pemerintah daerah guna perbaikan kinerja keuangan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.